PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus : Pilkades Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP

Oleh:

NUR AMILIA KARTIKA RAHMI

NIM. 18058061

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus: Pilkades Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)

Nama	**: Nur Amilia Kartika Rahmi**
NIM/TM	**: 18058061/2018**
Program Studi	**: Pendidikan Sosiologi**
Departemen	**: Sosiologi**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 1 September 2022

Mengetahui **Dekan FIS UNP**	**Disetujui Oleh,** **Pembimbing**
Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum **NIP. 19610218 198403 2 001**	**Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si** **NIP. 19731202 200501 1 001**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus: Pilkades Desa Ladang Panjang Kecamatan Saroiangun Kabupaten Sarolangun)

Nama	**: Nur Amilia Kartika Rahmi**
NIM/TM	**: 18058061/2018**
Program Studi	**: Pendidikan Sosiologi**
Departemen	**: Sosiologi**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 1 September 2022

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos.,M.Si	1.
2. Anggota	: Adri Febrianto, S.Sos, M.Si	2.
3. Anggota	: M. Isa Gautama, S.Pd., M.Si	3.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Nur Amilia Kartika Rahmi
NIM/TM	: 18058061/2018
Program Studi	: Pendidikan Sosiologi
Departemen	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **"Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pilkades Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Dengan demikian surat penyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 25 Agustus 2022

Mengetahui,

Kepala Departemen Sosiologi

Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si
NIP.19731202 200501 1 001

Saya yang menyatakan

Nur Amilia Kartika Rahmi
NIM.18058061

ABSTRAK

Nur Amilia Kartika Rahmi. 2018. "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa, Studi Kasus : Pilkades Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun". Skripsi. Mahasiswa Jurusan Sosiologi Program Studi Pendidikan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Bagaimana Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Ladang Panjang tahun 2021. Indonesia merupakan salah satu Negara Demokrasi terbesar di dunia, setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedaulatan dalam memilih dan dipilih baik di tingkat nasional sampai tingkat lokal seperti di Provinsi Jambi salah satunya Desa Ladang Panjang. Desa Ladang Panjang merupakan salah satu Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), yang mana ini merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Desa Ladang Panjang untuk memilih Kepala Desa. Desa Ladang Panjang sendiri sudah dilaksanakan beberapa kali pemilihan Kepala Desa. Tahun 2021 lalu, selalu yang terpilih adalah Kepala Desa dengan latar belakang Orang Ber uang. Menarik untuk melihat bagaimana Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Ladang Panjang.

Penelitian ini dianalisis memakai teori Fenomenologi Alfred Scrutz. Teori Fenomenologi adalah penjelasan terkait Fenomena perbuatan manusia yang dialami secara sadar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memakai Teknik purposive sampling dengan informan penelitian berjumlah 30 orang, mencakup masyarakat dan timses. Data yang dikumpulkan memakai teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Dalam menganalisis data menggunakan trianugulasi data dan memakai model Miles dan Huberman, bagiannya adalah reduksi data, penyajian data sekaligus penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Ladang Panjang, yakni 1) Dinamika dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, 2) Makna Politik Uang dalam Masyarakat, 3) Sikap terhadap Politik Uang.

Kata Kunci : Praktik Politik Uang, Fenomenologi, Pilkades, Desa Ladang Panjang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan tujuh lapis langit tanpa tiang dan tujuh lapis bumi tanpa gantungan, sehingga berkat serta rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memproleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Skripsi ini berjudul Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Pilkades Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Terima kasih peneliti ucapkan kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alm. (Drs. H. M. Hayat, M.Pd) dan Ibunda (Halimah) yang sudah bersusah payah perjuangkan peneliti sampai ketahap perguruan tinggi, terimakasih telah memberikan semua kasih sayang, mengikhlaskan semua pengorbanan, sekaligus ketulusan untaian Do'a sepanjang masa demi kesuksesan peneliti, sampai kapan pun peneliti tidak mampu untuk membalas semua kebaikan yang telah diberi

1. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Jurusan Sosiologi Program Studi Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan masukan dan saran serta keikhlasan dengan penuh kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Adri Febrianto, S.Sos., M.Si, Bapak M. Isa Gautama, S.Pd., M.Si dan Bapak Khairul Fahmi, S.Sos., M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritikan, saran dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi, demi penyempurnaan skripsi.

3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Program Studi Pendidikan Sosilogi yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti selama menjalankan perkuliahan sekaligus Abang dan Kakak Staf Administrasi Jurusan Sosiologi
4. Terimakasih kepada Ayuk tercinta saya Nailurrahmi, S.Pd.I
5. Terimakasih kepada Muk tercinta saya Ifan Aulia Rahman, S.Tr
6. Terimakasih kepada Lok tercinta saya Briptu Ilham Iqbal Maulana
7. Terimakasih Keluarga Besar Datuk H. Ibrohim (Alm) yang telah memberikan semangat dan motivasi buat kelancaran Skripsi
8. Seluruh keluarga besar Sosiologi yang telah memberikan semangat kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Terimakasih Keluarga Besar Wisma Halimah dan FSDI FIS UNP yang memberikan semangat dan motivasi buat kelancaran Skripsi
10. Terimakasih Keluarga Besar BEM KM UNP 1.2 yang telah memberikan semangat dan motivasi buat kelancaran Skripsi
11. Terimakasih Keluarga Besar HMPL yang telah memberikan semangat dan motivasi buat kelancaran Skripsi
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Padang, September 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
A. Kerangka Teori 11
B. Penelitian yang Relevan 19
C. Penjelasan Konseptual 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 29
A. Lokasi Penelitian 29
B. Tipe Penelitian 30
C. Teknik Pemilihan Informan dan Subjek Penelitian 30
D. Pengumpulan Data 30
E. Validitas Data 32
F. Analisis Data 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Gambaran Umum Desa Ladang Panjang 35
1. Sejarah Desa Ladang Panjang 35
2. Keadaan Geografis 37
3. Keadaan Sosial 39
4. Keadaan Ekonomi 42
5. Visi dan Misi 43

6. Kondisi Pemerintahan Desa 46
B. Dinamika Pilkades Tahun 2021 47
1. Politik Uang 49
a. Membentuk Timses 50
b. Pemetaan Wilayah 54
c. Nama yang diberi Uang 57
d. Pemberian Uang/Materi 59
e. Melakukan Pemantauan di Lapangan 60
C. Makna Politik Uang Dalam Masyarakat 61
D. Sikap Terhadap Politik Uang 63
a. Sikap Masyarakat 64
b. Toleran terhadap Politik Uang 67
E. Analisis Hasil Temuan dengan Teori Fenomenologi Alfred Schutz 88
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Ladang Panjang 37

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Ladang Panjang 38

Tabel 3. Pendidikan Penduduk Desa Ladang Panjang 39

Tabel 4. Lembaga Pendidikan Desa Ladang Panjang 40

Tabel 5. Pemenuhan Air Bersih Desa Ladang Panjang 40

Tabel 6. Data Keagamaan Desa Ladang Panjang 41

Tabel 7. Data Tempat Ibadah Desa Ladang Panjang 41

Tabel 8. Jenis Tanaman Desa Ladang Panjang 42

Tabel 9. Jenis Peternakan Desa Ladang Panjang 42

Tabel 10. Perikanan Desa Ladang Panjang 43

Tabel 11. Jenis Mata Pencaharian Desa Ladang Panjang 43

Tabel 12. Jumlah Aparat Desa Ladang Panjang 45

Tabel 13. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Ladang Panjang 45

Tabel 14. Nama Dusun Desa Ladang Panjang 45

Tabel 15. Nama Aparat Desa Ladang Panjang 46

Tabel 16. Kepala Dusun Desa Ladang Panjang 46

Tabel 17. Nama Anggota BPD Desa Ladang Panjang 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pemikiran 28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan 96

Lampiran 2. Pedoman Studi Dokument 98

Lampiran 3. Pedoman Observasi 99

Lampiran 4. Pedoman Wawancara 100

Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing.....102

Lampiran 6. Surat Tugas Seminar Proposal.....103

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian.....104

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 279,497,778 juta jiwa merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di Dunia. Demokrasi proses menuju dan menjaga masyarakat madani yang menghormati dan berusaha merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Kamil, 2002). Walaupun pilar sistem demokrasi Indonesia sudah ada dan terus berkembang, akan tetapi pada hakikatnya demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik disemua tingkatan masih perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan terus upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam memastikan bahwa implementasinya bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen. Pada bagian yang lebih subtantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang dilaksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.

Tercatat 120 dari 192 negara di dunia menurut World Forum on Democracy, memilih demokrasi sebagai bentuk tata kelola negara ("Ikhtisar Glob. State Democr. Mengkaji Ketahanan Demokr.," 2018). Artinya lebih dari setengah penduduk di dunia menerapkan Demokrasi Elektoral atau Pemilihan Umum untuk

memilih para pemimpinnya secara langsung. Demokrasi menjadi pilihan di banyak negara, karena ia menjanjikan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat artinya rakyat terlibat dalam kegiatan politik terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Pada politik electoral kedaulatan rakyat ditunjukkan melalui aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu dalam hal ini merupakan mekanisme demokrasi yang melibatkan masyarakat untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan politik (Budiardjo, 1982b). Menurut (Gaffar Janedjri M, 2012). Pemilu adalah sebuah wujud dan cara yang paling nampak untuk melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan rakyat melalui pemilihan umum akan memilih pemimpinnya. Pemilu sangat penting dalam negara demokrasi sebagai partisipasi masyarakat politik yaitu masyarakat aktif dalam kehidupa politik dengan memilih pemimpin negara sekaligus mekanisme mengirim kekuasaan politik secara damai dan tidak diproleh dengan cara kekerasan. Konsep pemilu tercipta dari gagasan demokrasi yang berarti kebebasan, keadilan dan persamaan individu dalam segala bidang (Nadir, 2018).

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih kompleks. Secara geografis Indonesia dibentuk dari 17.000 gugusan pulau. Secara demokrafis, Indonesia merupakan hasil integritas dari keragaman penduduknya. Terkait dengan pelaksanaan demokrasi elektoral, Indonesia menyelenggarakan tiga jenis pemilu secara langsung. Pertama, pemilihan umum anggota legislative yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Penyelengaraan pemilu legislatif sudah berjalan sejak orde lama. Pemilu 1955 merupakan pengalaman pertama Indonesia menyelenggarakan pemilu. Pada orde baru, Indonesia menyelenggarakan enam kali pemilu. Sedangkan pada era reformasi, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 merupakan pemilu ke 5 sejak runtuhnya orde baru. Untuk pertama kali, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak dengan pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, pemilihan umum eksekutif. pemilu eksekutif dapat dibagi dua yakni pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), baru dilaksanakan pada tahun 2004. Sampai tahun 2019 sudah berjalan empat kali pemilihan. Pilpres 2004 sampai 2014 dilakasanakan terpisah dengan pemilu legislatif, yakni setelah pemilu legislatif. Maka pada pilpres 2019 dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan melalui demokrasi perwakilan, melalui anggota DPR dan MPR. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan setiap 5 tahun sekali.

Selanjutnya, pemilihan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk di antaranya pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Wali Kota. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 diselenggarakan secara langsung sesuai dasar UU No. 32 tahun 2004 terkait pemerintahan daerah. Kepala Daerah beserta Wakil dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut (Rosidin, 2010).

Di samping ketiga pilkada di atas, sebenarnya ada satu pemilu lagi yang diselenggarakan di Indonesia, yakni pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades merupakan pesta demokrasi pada tataran terendah. Dimana masyarakat Desa bisa ikut serta dalam memberikan suara dalam memilih Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelengaraan pemerintahan Desa. Dalam banyak hal penyelenggaraan pilkades sama dengan pilkada bahkan pilpres. Namun pilkades tidak masuk pada rezim pemilu. Adapun pelaksanaan pilkades diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih rinci pada UU tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut juga ditegaskan bahwa pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara Luber dan Jurdil. Pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam 3 bergelombang dengan mempertimbangkan pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa. Dilaksanakan maksimal 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun.

Pilkades diselenggarakan secara serentak ditingkat Kabupaten. penyelenggaraan pilkades dibentuk oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meski tidak masuk dalam rezim pemilu bukan berarti penyelenggaraan pilkades lebih sederhana dibandingkan pilkada atau pilpres. Secara umum tahapan dalam pelaksanaan pilkades hampir sama dengan pemilu lainnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014

tentangc pemilihan Kepala Desa, mengatur mekanisme tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tahapan pertama adalah persiapan. Pada tahapan terdiri dari pembentukan panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan penetapan pemilih. BPD menetapkan panitia pemilihan dan melaporkan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 hari setelah penetapan, panitia pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan (LKD) dan tokoh masyarakat. Tahap pencalonan pilkades yaitu pendaftaran penelitian calon, penetapan sekaligus pengumuman calon kampanye. Tahap pemungutan dan perhitungan suara pilkades yaitu surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan sekaligus distempel, tanda coblos dapat pada satu kotak yang memuat satu calon Kepala Desa. Terakhir tahap penetapan hasil. Pada tahapan ini panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

Meski pilkades dilaksanakan pada tingkat terendah namun dinamika politik yang menyertainya tidaklah rendah. Pemilihan Kepala Desa menjadi salah satu pemilihan umum yang sengit karena kursi sebagai Kepala Desa diperebutkan oleh banyak orang. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh salah satu kebijakan pemerintahan pusat untuk memberikan dana desa sebesar satu milyar. Kebijakan tersebut menjadi pemikat kedudukan sebagai Kepala Desa. Kerawanan politik bisa jadi lebih mengkhawatirkan dari pada jenis pemilu lainnya. Mengingat penyelenggaraan pilkades secara jarak, fisik, geografis, psikologis dan sosiologi

langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, kontestan yang terlibat, para pendukung. Maka sangat memungkinkan gesekan politik antar warga, antar calon dan antar pendukung jauh lebih mengkhawatirkan. Pemilihan Kepala Desa seringkali diwarnai berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran dalam pemilu yang marak terjadi adalah politik uang. Calon Kepala Desa melakukan Praktik politik uang sebagai upaya mempengaruhi pilihan dari pemilih (Putri et al., 2020). calon Kepala Desa meyakini bahwa politik uang masih dianggap efektif untuk memenangkan kontestasi politik (Putri et al., 2020). Calon Kepala Desa melakukan perubahan jenis politik uang dengan memberi barang kepada pemilik hak suara. Pemberian yang dilakukan dapat berupa sembako hingga pakaian. Sembako yang diberikan meliputi mie, tepung, gula dan sebagainya (Putri et al., 2020). Pada sisi lain, penyelesaian sengketa dalam pilkades diserahkan Bupati/Wali Kota yang merupakan kewajibannya apabila terjadi pada daerahnya. Hal ini tertera dalam Pasal 37 ayat 6 UU Desa yang berisikan, " dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan sampai waktu yang ditentukan.

Desa Ladang Panjang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Desa Ladang Panjang adalah salah satu contoh proses pemilihan Kepala Desa dengan tingkat dinamika yang relatif dinamis. Kedinamisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari selalu munculnya isu Praktik politik uang disetiap pemilihan Kepala Desa. Meski tidak dapat dibuktikan secara hukum, namun berdasarkan observasi dan penelitian awal Praktik politik uang tersebut terjadi dalam penyelenggaraan pilkades Ladang

Panjang. Tim kampanye mengambil peran besar dalam pilkades Ladang Panjang. Tim kampanye dapat mengajak masyarakat Desa Ladang Panjang memilih calon Kepala Desa yang dikehendaki, dengan bersifat persuasif. Pada saat inilah akan terjadi Praktik politik uang. Seperti yang diketahui bahwa praktik suap-menyuap antara warga dengan tim sukses calon Kepala Desa Ladang Panjang akan terjadi saat pemilihan Kepala Desa diadakan. masyarakat Desa sangat dipengaruhi oleh Praktik politik uang. Sehingga upaya me-lobby warga Desa Ladang Panjang bukan suatu hal yang baru di masyarakat saat diadakan pemilihan. Hal ini dilakukan oleh calon Kepala Desa agar mendapatkan suara dari mereka.

Pada tanggal 21 Juli 2021 telah dilaksanakan pilkades di Desa Ladang Panjang, pada tahun ini ada lima calon Kepala Desa di Desa Ladang Panjang yang beberapa calon Kepala Desa melakukan Praktik Politik Uang, meskipun ada beberapa yang tidak melakukan nya. Bentuk politik uang calon Kepala Desa ini bisa beragam mulai dari uang, kebutuhan pribadi, layanan, hingga sarana dan prasarana. Beberapa calon Kepala Desa melaksanakan Praktik politik uang. Warga Desa Ladang Panjang juga banyak yang menerima bahkan merasa beruntung dengan adanya Praktik politik uang tersebut. Berdasarkan dari hasil TPS, terkhusus tahun ini pemenang pilkades bukanlah orang yang tidak melaksanakan politik uang akan tetapi pemenang nya adalah orang yang melaksanakan Praktik politik uang kepada masyarakat. Menurut salah satu masyarakat Desa Ladang Panjang bahwa tiap-tiap calon pilkades mempunyai teknik tersendiri dalam memberi politik uang tersebut. Ada calon kades yang memberi secara diam atau hanya orang terdekat yang mengetahuinya, ada yang

memberi secara cuma – cuma dalam artian tidak banyak dan jika tidak terpilih nantinya mereka merasa tidak rugi, dan masih banyak lagi cara lainnya. Akan tetapi setiap calon Kepala Desa memiliki maksud yang sama yaitu memproleh suara terbanyak dan menjadi pemenangnya.

Terkait dengan Praktik politik uang, sudah banyak dilakukan. Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Roy Marthen Moonti 2015), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo dengan judul " Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi" yang mana hasil penelitian dalam pemilihan Kepala Daerah. Fokus dari penelitian tersebut adalah dampak negatif politik uang terhadap kualitas seorang pemimpin yang dihasilkan melalui pemilihan Kepala Daerah. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini yaitu dampak politik uang di Indonesia dapat menghancur tatanan demokrasi yang ada karena politik uang dibiarkan berkembang sekaligus meraja lela ditambah dengan kecenderungan masyarakat yang permisif.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh (Akbar, 2016), mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ushuludin, Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba dan Faktor yang melatar belakangi masyarakat menerima Politik Uang". Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini yaitu politik uang mempengaruhi terhadap ikut serta masyarakat Barugae pada Pilkada 2015. Kebanyakan masyarakat Barugae yang dapat politik uang ikut serta pada pilkada meskipun dalam pemberian uang atau barang dan sejenisnya kepada masyarakat tidak menentukan pilihan masyarakat untuk

memberikan suara. Pada penelitisan ini pengaruh politik uang sangat menentukan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian ini memiliki fokus objek penelitian kepada Praktik politik uang yang dilakukan oleh kandidat kepala desa melalui bantuan timses dengan menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas yang menjadi fokus permasalahan yaitu tentang Praktik politik uang pada pemilihan Kepala Desa di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Pilkades diselenggarakan secara serentak ditingkat Kabupaten. penyelenggaraan pilkades dibentuk oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meski tidak masuk dalam rezim pemilu bukan berarti penyelenggaraan pilkades lebih sederhana dibandingkan pilkada atau pilpres. Secara umum tahapan dalam pelaksanaan pilkades hampir sama dengan pemilu lainnya. Pelaksanaan pilkades dapat dikatakan miniatur pelaksanaan pilkada. Ketika Pilkades dilaksanakan maka akan menyaksikan pemasangan spanduk, pergerakan tim sukses, perang ide, pengerahan masa dan lainnya. Bahkan pada pilkades, ditemukan Praktik poltik uang. Meski sulit dibuktikan tapi terjadi dibanyak pemilu, salah satunya dalam pemilihan penyelengaraan pilkades di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Menarik untuk melihat dan menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku

masyarakat terhadap Praktik politik uang dalam pemilihan Kepala Desa Ladang Panjang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menjelaskan bagaimana Praktik politik uang pada pemilihan Kepala Desa Ladang Panjang

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang berjudul **Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)**

Maka terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai panduan sekaligus referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Praktik politik uang

b. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait faktor penyebab yang melatar belakangi calon Kepala Desa Ladang Panjang melakukan Praktik politik uang pada pemilihan Kepala Desa Ladang Panjang

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang mau dicapai, penelitian diharapkan mampu sekaligus mempunyai manfaat dalam meminimalisir Praktik politik uang pada pemilihan Kepala Desa di Desa Ladang Panjang